

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA DI JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Maya Sari Harahap¹, Suparni²

Universitas Adzka

E-mail: mayasariharahap34@gmail.com¹, eltang020@gmail.com²

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2024-04-30
Review : 2024-05-11
Accepted : 2024-05-28
Published : 2024-07-31

KATA KUNCI

Analisis, Kurikulum Merdeka, Pendidikan SD.

A B S T R A K

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis kebijakan pendidikan dan penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Pendidikan yang sudah diatur oleh pemerintah melalui Undang-undang dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia termasuk dalam jangkauan daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana metode yang digunakan tidak berdasarkan pada angka-angka namun memahami makna dari beberapa masalah sosial yang ada. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah kebijakan pendidikan yang disosialisasikan oleh pemerintah sudah dapat diakses secara online dan kapan saja. Kemudian, penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar juga sudah dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintah dalam menyamaratakan pendidikan di Indonesia baik dari Kurikulum tahun 1947 hingga kurikulum terbaru tahun 2024 yaitu Kurikulum Merdeka.

A B S T R A C T

Keywords: Analysis, Education, Kurikulum Merdeka, Primary School.

This research aims to determine the analysis of education policy and the implementation of the Independent Curriculum in Elementary Schools. Education that has been regulated by the government through law can be applied evenly throughout Indonesia, including within the 3T areas (frontier, outermost, and underdeveloped). The research method used in this research is descriptive qualitative, where the method used is not based on numbers but understands the meaning of several existing social problems. The data sources in this research are divided into two, namely primary data and secondary data. The results obtained in this research are that educational policies socialized by the government can be accessed online and at any time. Then, the implementation of the

Independent Curriculum in Elementary Schools has also been carried out by the government's aims and objectives in generalizing education in Indonesia, from the 1947 Curriculum to the newest curriculum in 2024, namely the Independent Curriculum.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sarana yang membangun sumber daya manusia dalam bidang ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan dapat menciptakan generasi yang membangun bangsa dan negeri lebih maju. Sumarsih dkk (2022) fungsi dan tujuan dari Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dalam pembentukan karakter hingga menciptakan kecerdasan bagi kehidupan bangsa. Selain itu, pendidikan juga diatur dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang berupa landasan hukum dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Tujuan dari pendidikan beserta fungsinya memberikan pemahaman agar setiap Warga Negara Indonesia dapat memanfaatkan pendidikan dengan sebaik mungkin, untuk itu sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-undang sebagai dasar hukum. Kemajuan dalam pendidikan di Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat bagi bangsa Indonesia sendiri.

Dalam peranannya pendidikan di Indonesia pada sekolah formal sehingga jenjang pendidikan tersusun dari PAUD dua tahun (Pendidikan Anak Usia Dini), SD enam tahun (Sekolah Dasar), SMP tiga tahun (Sekolah Menengah Pertama), SMA tiga tahun (Sekolah Menengah Atas), dan Perguruan Tinggi Strata Satu empat tahun (S1). Kemudian jenis pendidikan dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu: pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Melangkah dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ada di Indonesia, tentunya harus ada faktor dalam keberhasilan pendidikan tersebut. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan, yaitu: pendidik (guru), peserta didik (siswa), sarana dan prasarana pendidikan, tujuan pendidikan (tujuan pembelajaran), dan lingkungan. Beberapa hal yang ada di atas menunjukkan saling keterkaitan antara satu dengan yang lain sehingga dapat menunjang keberhasilan suatu pendidikan yang bermutu.

Peranan pendidikan di Indonesia pastinya harus didukung dengan kurikulum dalam pengembangan mencerdaskan anak bangsa. Kurikulum terakhir dalam implementasinya adalah K13 atau Kurikulum 2013, kurikulum ini dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menggantikan kurikulum sebelumnya yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Saat ini kurikulum yang sedang berjalan di Indonesia sendiri adalah Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dalam pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki waktu yang cukup dalam menggali konsep dan menguatkan kompetensi. Guru juga mendapat keleluasaan dalam memilih perangkat bahan ajar sehingga proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Karakteristik Kurikulum Merdeka sendiri yaitu: pengembangan soft skills dan karakter, fokus pada materi esensial, dan pembelajaran yang fleksibel. Selanjutnya dalam penguatan pencapaian profil pelajar dapat dikembangkan berdasarkan topik atau tema yang sesuai. Selain itu, pilihan dalam implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagai. Rahmadayanti dan Hartoyo (2022) agar pengimplementasian bisa

berjalan dan sesuai dengan penggunaannya, guru diharapkan dapat mempelajari lebih dahulu tentang Kurikulum Merdeka dan mempertimbangkan sesuai dengan fase peserta didik agar dapat tercapai tujuan pembelajaran yang bermakna.

Aprima dan Sari (2022) penerapan Kurikulum Merdeka lebih mudah dibandingkan dengan kurikulum yang ada sebelumnya. Dalam penerapannya di sekolah, kurikulum ini memberikan kemudahan kepada pengajar atau guru dalam implementasi. Saputra dan hadi (2022) guru di Sekolah Dasar memberikan tanggapan yang positif terhadap penerapan Kurikulum Merdeka. Pada hakikatnya kurikulum yang disosialisasikan dengan baik dan benar akan membawa dampak yang positif bagi para pengajar untuk penerapannya kepada peserta didik di sekolah. Fokus penelitian pada tulisan ini memfokuskan pada penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Pertanyaan yang dapat menjadi sasaran utama adalah, apakah penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar sudah diimplementasikan secara merata dan apakah hasil dari penerapan kurikulum tersebut membuahkan hasil yang positif bagi guru dan peserta didik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Creswell (2016) penelitian kualitatif yang mengeksplorasi serta memahami makna dari beberapa individu maupun kelompok yang berasal dari masalah sosial. Metode penelitian ini merupakan suatu gambaran, deskripsi, dan analisis suatu objek dari situasi yang telah diperoleh. Menurut Purwanto dan Dyah (2018) instrumen penelitian adalah alat dasar yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah: observasi dan wawancara. Selanjutnya teknik pengumpulan data berdasarkan literatur yang didapat dari sumber online. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai penunjang dalam mengumpulkan informasi sebanyak mungkin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil data di lapangan Gambaran Umum Kurikulum di Indonesia 1.1947, Rencana Pelajaran dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai Kurikulum 1947 dikenal dengan istilah Rentjana Pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan belanda ke kepentingan nasional. 2.1964, Rencana Pendidikan Sekolah Dasar Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 6 Nomor 4, 2023 | 3109 Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari krida. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya.

1994, Kurikulum 1994 Tahun 1994 pemerintah memperbaharui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Beberapa perubahannya, mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. 8.2004, Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2004 lahir Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai pengganti Kurikulum 1994, kemudian dikembangkan kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. 9.2006, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Kurikulum 2006 inilah yang biasa dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan diberlakukan sejak Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2003.10.2013, Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasi pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada Kompetensi Inti 1 (K1) dan sikap sosial pada Kompetensi Sosial (K2). 11.2022, Kurikulum Merdeka Merdeka belajar menjadi sebuah terobosan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menjadikan proses pembelajaran di setiap sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. Dampak positifi merdeka belajar ditujukan kepada guru, peserta didik, dan bahkan wali murid (Muin, dkk, 2022).

Analisis Kebijakan Pendidikan Kurikulum Merdeka

Berdasarkan paparan kurikulum yang ada di Indonesia dari tahun 1947 hingga tahun 2022 Kurikulum Merdeka. Dari setiap kurikulum yang ada memiliki karakteristik sendiri sehingga kurikulum itu memiliki perkembangan bahkan menyesuaikan dengan era yang ada. Tahun 1947 Kurikulum Rentjana berorientasi pada pendidikan ke kepentingan nasional sehingga kurikulum tersebut memiliki penerapannya tersendiri. Tahun 2022 pemerintah mengeluarkan kurikulum terbaru yaitu Kurikulum Merdeka yang menggantikan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum 2013 (K13). Dalam analisis kebijakan kurikulum Rokim (2019) menjelaskan bahwa ada empat hal yang terkandung dalam analisis kebijakan, yakni:

1. Sebagai ilmu sosial terapan, artinya suatu hasil nyata dari suatu misi ilmu pengetahuan yang terlahir dari gerakan profesionalisme ilmu-ilmu sosial.
2. Menghasilkan dan mendayagunakan informasi, ialah suatu bagian dari kegiatan analisis kebijakan yaitu pengumpulan, pengolahan, dan pendayagunaan data agar menjadi masukan yang berguna bagi pembuat keputusan.
3. Menggunakan “metode inquiri” dan argumentasi berganda, ialah penggunaan jenis-jenis metode dan teknik dalam analisis kebijakan seperti metode yang sifatnya deskriptif, metode yang sidatnya preskriptif, metode yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif. Penggunaan metode tersebut sangat tergantung pada sifat isu kebijakan yang sedang disoroti.
4. Pengambilan keputusan yang bersifat politis, ialah suatu proses pendayagunaan informasi di dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Ruang lingkup kebijakan pendidikan memiliki hubungan erat dengan kebijakan publik. Analisis kebijakan pendidikan menurut Dunn yang adalah seorang Profesor dalam Analisis Kebijakan di University of Pittsburgh Amerika Serikat yang telah dikenal luas kepakarannya dalam bidang kebijakan pendidikan. Dalam analisis kebijakan versi Dunn ada lima prosedur yang harus dijalankan pada sebuah analisis kebijakan, yaitu:

1. Definisi, menghasilkan informasi tentang kondisi yang ditimbulkan dalam kebijakan.
2. Prediksi, menyediakan informasi tentang konsekuensi di masa mendatang dalam penerapan alternatif termasuk dalam melakukan sesuatu.
3. Preskripsi, menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi kebijakan di masa mendatang.
4. Deskripsi, menghasilkan informasi tentang konsekuensi saat ini dan masa lalu kemudian penerapan dalam alternatif kebijakan.
5. Evaluasi, guna sebagai alternatif kebijakan dalam pemecahan suatu masalah.

Analisis kebijakan pendidikan merupakan perangkat aturan yang keberpihakannya dimiliki oleh pemerintah demi terciptanya pendidikan yang sesuai dengan cita-cita sehingga sampai dengan tujuan yang diinginkan, keberpihakan di sini termasuk politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan dan sebagainya (Hasbullah, 2015: 27). Dalam paparan Sari dkk (2020) bahwa pendidikan sangat penting untuk suatu negara sehingga pendidikan harus diusahakan dan pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan agar pendidikan tetap diupayakan dan terus berjalan. Bersamaan dengan hal tersebut bahwa kebijakan pendidikan saat ini yaitu Kurikulum Merdeka yang memiliki program kebijakannya sendiri.

Kurikulum Merdeka memiliki tujuannya sendiri dalam membuat pembelajaran lebih bermakna. Tujuan utama dalam program ini adalah memperbaiki sistem yang sudah dan mengembangkannya lebih baik lagi. Fadillah dan Hibana (2022) sistem pendidikan Indonesia dapat diperbaiki melalui Kurikulum Merdeka sehingga peserta didik akan diasah melalui belajar mandiri dan memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, kreativitas, kerja sama dan berpikir kritis. Kurikulum Merdeka sendiri memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Materi pada kurikulum merdeka juga lebih memfokuskan dan memiliki relevansi dengan tahapan perkembangan terhadap peserta didik. Di samping itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Kebijakan Kurikulum Merdeka Episode 15: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar pada 11 Februari 2022. Tahun 2022/2023 satuan pendidikan dapat memilih implementasi kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing mulai dari TK B, Kelas I, IV, VII, dan X. Untuk mengukur kesiapan satuan pendidikan, pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dalam menggunakan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini hadir agar melengkapi kekurangan dari kurikulum sebelumnya, sehingga kurikulum ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya.

Satuan pendidikan SD/MI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Proporsi beban belajar di SD/MI terbagi menjadi dua bagian, yaitu: a) pembelajaran intrakurikuler, dan b) proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik, dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama.

Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar

Analisis dalam kebijakan pendidikan pada Kurikulum Merdeka telah menjelaskan bagaimana jalannya kurikulum tersebut dapat dijalankan dan memiliki kelebihan serta kekurangan. Berdasarkan hasil analisis yang ada di atas, perlunya implementasi atau penerapan terhadap Kurikulum Merdeka. Dalam dukungan pemerintah agar implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan dengan baik, maka diadakan dukungan implementasi Kurikulum Merdeka melalui kebijakan penyediaan buku pendidikan. Penyusunan buku, buku pendidikan yang telah diimplementasikan di sekolah penggerak.

Berdasarkan hasil angket yang disebarluaskan oleh satuan pendidikan terhadap kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka yang mengukur kesiapan guru dan tenaga

kependidikan ada tiga pilihan implementasi Kurikulum Merdeka jalur mandiri. Dalam pemilihan implementasi ini tidak ada yang paling benar melainkan pilihan yang paling sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan sehingga semakin sesuai akan lebih efektif implementasi Kurikulum Merdeka.

1. Mandiri Belajar Menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan.
2. Mandiri Berubah Menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan.
3. Mandiri Berbagi Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan.

Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 2774/H.H1/KR.00.01/2022 kategori Mandiri berubah berarti satuan Pendidikan mulai tahun ajaran 2022/2023 akan menerapkan kurikulum merdeka, menggunakan perangkat ajar yang disediakan dalam PMM (Platform Merdeka Mengajar), sesuai dengan jenjang satuan Pendidikan yaitu perangkat ajar untuk kelas I dan IV pada jenjang SD. Selain itu ada kategori Mandiri belajar yang berarti satuan Pendidikan menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, dengan tetap menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan/Kurikulum Darurat.

Alimuddin (2023) pemahaman makna merdeka belajar dan peran guru dalam merdeka belajar membantu guru dan siswa dalam berpikir, lebih inovatif dan kreatif, serta Bahagia dalam pembelajaran. Masih banyak guru yang belum memahami secara teoretis dan praktis merdeka belajar padahal pemahaman guru terhadap reformasi kurikulum sangat esensial. Kurangnya pemahaman guru tentang teori dan praktik kurikulum merdeka tentu memberikan dampak yang negatif. Dampak negatif tersebut diantaranya yaitu guru merasa kesulitan menerapkan kebijakan merdeka belajar di sekolah dan di kelas serta guru kesulitan mengembangkan metode pembelajaran merujuk pada kurikulum merdeka (Mustofa dan Mariati, 2022).

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar memberikan akses terbuka bagi para guru dan tenaga pendidik agar mengeksplorasi sesuai dengan tujuan dan topik pembelajaran. Guru dibebaskan untuk menggunakan platform ajar dan siswa diharapkan mampu mengembangkan diri secara mandiri agar bisa menentukan potensi sesuai dengan kompetensi yang ada pada peserta didik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan pendidikan dan penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar sudah sesuai dengan target pemerintah dalam penjabarannya. Akan tetapi, masih banyak juga sekolah yang masih bingung dan belum mengerti mengenai penjabaran maksud dan tujuan dari Kurikulum Merdeka. Untuk itu, diharapkan guru dan tenaga pendidik dapat bekerja sama dalam memahami Kurikulum Merdeka agar penerapan kurikulum tersebut dapat berjalan dan sesuai dengan tujuan pemerintah. Dalam penerapan Kurikulum Merdeka guru dibebaskan untuk memilih platform ajar dan siswa mampu untuk mengembangkan diri dalam pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran, sehingga peserta didik mampu untuk melakukan pembelajaran secara mandiri namun tetap dalam bimbingan dan pengawasan dari guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, Dan Masalah masalah Sosial. Yogyakarta: Gaya Media
- Alimuddin, J. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah KONTEKSTUAL*, 4(02), 67-75.
- Almarisi, A. (2023). Kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka pada pembelajaran sejarah dalam perspektif historis. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 7(1), 111-117.
- Aprima, D., & Sari, S. . (2022). Analisis Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pelajaran Matematika SD. *Cendikia : Media Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 13(1), 95-101. <https://doi.org/10.35335/cendikia.v13i1.2960>.
- Aprima, D., & Sari, S. . (2022). Analisis Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pelajaran Matematika SD. *Cendikia : Media Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 13(1), 95-101. <https://doi.org/10.35335/cendikia.v13i1.2960>.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Depdiknas .2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional.
- D. W., & Hadi, M. S. (2022). Persepsi guru sekolah dasar jakarta utara dan kepulauan seribu tentang kurikulum merdeka. *Holistika: Jurnal Ilmiah PGSD*, 6(1), 28-33.
- Fadillah, C. N., & Yusuf, H. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 8(2), 120-137.
- Hasbullah, H. 2015. *Kebijakan Pendidikan: dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iskandar, S., Rosmana, P. S., Farhatunnisa, G., Mayanti, I., Apriliya, M., & Gustavisiana, T. S. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2322-2336.
- Liando, M. R., & Kadamehang, G. (2023). ANALISIS MODEL PEMBELAJARAN DAN PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SD NEGERI 1 MANADO. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 639-645.
- Muin, A., Fakhruddin, A., Makruf, A. D., & Gandi, S. (2022). Pengembangan Kurikulum Merdeka. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Mustofa, M., & Mariati, P. (2023). Implementasi kurikulum merdeka belajar di sekolah dasar: dari teori ke praktis. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 13-18.
- Rahmadayanti, D., & Hartoyo, A. (2022). Potret kurikulum merdeka, wujud merdeka belajar di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7174-7187.
- Rokim, R. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya Dalam Pendidikan Islam. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60-69.
- Saputra, Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansah, Y., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Analisis implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8248-8258.